

## SIARAN PERS

### **BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemeriksaan Daerah (LKPD) untuk Tiga Kabupaten di Papua Barat**

Manokwari, 4 Agustus 2025 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Manokwari Selatan. Penyerahan LHP ini merupakan amanat dari Pasal 23E ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 17 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Agus Priyono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang baik dari seluruh pihak, termasuk Ketua DPRD dan Bupati serta jajaran pemerintah daerah ketiga kabupaten tersebut. "Kolaborasi ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Sesuai Undang-Undang, pemeriksaan BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan, dengan memperhatikan empat hal, yaitu: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan beberapa permasalahan yang perlu segera

Agus Priyono menekankan pentingnya tindak lanjut atas temuan ini. Pemerintah daerah diminta untuk segera mengupayakan pemulihan temuan BPK serta memperbaiki tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Manokwari Selatan diwajibkan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan.

LHP ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi DPRD ketiga kabupaten untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, terutama dalam pembahasan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan penetapan Perubahan APBD TA 2025.

"Kami berharap sinergi ini terus terjalin untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat," tutup Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.